

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mohammad Mulyadi. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*. Studi Komunikasi Dan Media 16 (2012).
- Anim Purwanto. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. pusat pengembangan pendidikan dan penelitian Indonesia, 2022.
- Fajar ND and Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013. Hlm.35.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007. Hlm.35
- Gregorius Cristison Bertholomeus “*Hukum Kriminologi*”, Padang: CV. Gita Lentera, 2024 hal. 1-3
- Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, Printice Hall, New York, 1998, hlm. 6
- Muhamma Mustofa, “*Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*”, (Jakarta : Kencana, 2021) hal. 25
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemerasan*
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Prenada Media, 1996), 109.
- Extrix Mangkeprijanto, “*Hukum Pidana dan Kriminologi*”, (2019), hal. 53
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 121.
- Moeljatno. “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal. 20
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 57
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1986, hlm. 15
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* Deventer: Kluwer, 1984, hlm. 101

Jurnal/Artikel :

Muhammad Fakhrul, Abdul Rivai Ras, dan Koesnadi Kardi, "Keamanan Nasional Sebagai Sebuah Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Bagi Indonesia," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 no.7(2022):9017-9018.

Khoirul Anam, 18–21; Susi Retnowati, Asri Agustiwi, dan Putri Maha Dewi, "Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial New Ratu Adil UNSA* 6 no. 2(2022):8.

Udiyo Basuki, “25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1 (2023), hal.9

Mohammad Kenny Alweny, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol.VIII,No.3 (2019), hal. 48

Yoshua Milano Mapanawang, DKK, “Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2022), hal. 10

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Beirut: Librairie Du Liban & London: Macdonald & Evans Ltd., 1974, hlm. 713

James Nolan, *Interpretation, Techniques, and Exercises*, Professional Interpreting in the Real World, Clarendon: Multilingual Matters Ltd. 2005, hlm.2.

Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra Dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Beserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No.3 (2023), hal. 318

Olken, Benjamin A., & Barron, Patrick. (2009), ““*The Simple Economics of Extortion: Evidence from Trucking in Aceh*”. *Journal of Political Economy*, 117 (3), hal. 417-452

Ginocchio, K. (2022). *Legalized Extortion: A State-led Governance Regime to Control Informal Street Vending at Lima’s Gamarra Market, Peru*.

Vasiu, L., & Vasiu, I. (2020). “*Forms and Consequences of the Cyber Threats and Extortion Phenomenon*” *Jurnal: Studies in Business and Economics*, 15(3), 238–248.

Sumber Internet :

Ahmad Fahmi Fadilah, “Perbedaan Pemerasan dan Pemalakan dalam Hukum dan Kehidupan Sehari-hari”, *kumparan.com*, <https://kumparan.com/skyyblauw/perbedaan-pemerasan-dan-pemalakan-dalam-hukum-dan-kehidupan-sehari-hari-24QZg5iHv4b/full>, (diakses 3 Februari 2025).

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, “Aksi Premanisme Terbanyak di Indonesia”, <https://www.kompas.id/artikel/bak-gotham-city-aksi-premanisme-mati-satu-tumbuh-seribu?>

Klinik Hukumonline. (2024). *Penjelasan Pasal 368 KUHP dan Pasal 482 KUHP Baru*.

CNN Indonesia, “Polisi Terima 43 Laporan Kasus Pemalakan THR oleh Oknum Ormas”, 10 April 2024, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 20 September 2025

Undang-Undang :

Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 482 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum